



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI KAMIS, 20 AGUSTUS 2026



RINGKASAN BERITA HARI INI



DIALOG: Perwakilan pengurus Himpuhan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo menemui Bupati Sidoarjo Subandi.

Berdialog dengan Bupati, HMI Dukung Pemberantasan Miras

Juga Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

KOTA-Perwakilan pengurus Himpuhan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo menemui Bupati Sidoarjo Subandi pada Selasa (18/8/2026). Mereka menyampaikan rencana pelantikan pengurus HMI Cabang Sidoarjo Periode 2026-2027 yang akan dilaksanakan di Gedung Delta Wicakana.

HMI Cabang Sidoarjo Sultan Saladin Batubara. Mereka menyatakan harapan agar Bupati Subandi hadir dalam pelantikan tersebut. Selain itu, Pemkab Sidoarjo diharapkan dapat memfasilitasi pelantikan pengurus HMI Cabang Sidoarjo yang rencananya digelar pada 4 September 2026.

Dalam pertemuan di ruang Delta Wicakana Setda Sidoarjo, Subandi juga menerima perwakilan HMI Cabang Sidoarjo.

AIDS yang gencar dilakukan. Bupati Subandi menyambut baik kedatangan pengurus baru HMI Cabang Sidoarjo ini. Organisasi HMI telah menjadi salah satu garda terdepan perjuangan membangun bangsa dan negara, termasuk dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Bupati Subandi, mahasiswa adalah aset bangsa yang menjadi motor penggerak pembangunan.

HMI. Kita terus memberikan support karena Adik-Adik HMI ini penerus masa depan bangsa kita. Tugas pemerintah daerah, harus hadir di tengah-tengah mereka," ucapnya. Bupati Subandi juga siap memfasilitasi pelantikan pengurus baru HMI Cabang Sidoarjo. Ia mempersilakan pelantikan dilaksanakan di Pendopo Delta Wicakana.

BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Capai 46,27%

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 46,27%. Capaian tersebut melampaui target sebesar 41,34%. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo masih mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja rentan. Sebab, dari sekitar 1,05 juta angkatan kerja di Sidoarjo, masih ada ratusan ribu pekerja yang belum terlindungi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Arie Fianto Sofyan menyebut per 14 Agustus 2026 sebanyak 474.455 pekerja telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara sekitar 575.938 pekerja lainnya masih perlu mendapatkan perlindungan.

"Kami terus berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo untuk memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menjaga kepesertaan agar pekerja yang sudah terlindungi tidak kembali kehilangan jaminannya," ujar Arie, Rabu (19/8/2026).

Menurut Arie, dukungan Pemkab Sidoarjo turut mendorong capaian kepesertaan menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Timur. Kolaborasi tersebut akan terus diperkuat untuk memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Arie menyebut perlindungan jaminan sosial telah memberikan manfaat besar kepada pekerja. Hingga 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan sekitar Rp 2,2 triliun kepada lebih dari 204 ribu penerima manfaat.



Pemkab Sidoarjo dukung Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan.

Sedangkan sepanjang Januari-Juli 2026, manfaat telah diberikan kepada sekitar 31 ribu pekerja dengan nilai mencapai Rp 607 miliar. "Perbup Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2026 menjadi salah satu landasan untuk memperkuat sinergi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan perangkat daerah," jelasnya.

Selain, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menegaskan capaian kepesertaan tidak boleh hanya berhenti pada angka. Menurutnya, program perlindungan pekerja harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk membantu menurunkan angka kemiskinan.

"Target yang ditetapkan bukan sekadar mengejar angka kepesertaan. Yang lebih penting adalah bagaimana perlindungan jaminan sosial ini benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan ikut menurunkan angka kemiskinan," tegas Fenny.

Fenny meminta evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke depan tidak hanya mencatat jumlah peserta dan anggaran yang telah dikeluarkan. Evaluasi juga harus dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk perubahan kelompok desil 1 hingga 5. "Kami berharap data yang ditampilkan benar-benar berdampak terhadap penurunan kemiskinan," tuturnya. (md/rus)



DPRD Sidoarjo Sidak Dugaan Pencemaran Sungai Lippo Plaza

Beri Waktu Dua Pekan Benahi Pengolahan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Komisi C DPRD Sidoarjo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke saluran Sungai depan Lippo Plaza di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, Kamis, 13 Agustus 2026. Hal itu menyusul viralnya video warga di media sosial yang menyebut bau menyengat dan air dalam saluran air tersebut keruh dan berwarna hitam.

Rombongan Komisi C DPRD Sidoarjo terdiri dari Choirul Hidayat, Anang Siswandoko, Muh Zakaria Dimas, dan Emir Firdaus, didampingi Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Makhmud serta jajaran DLHK, terlebih dahulu memeriksa saluran air di depan pusat perbelanjaan tersebut.

Setelah menemukan kondisi air yang hitam dan berbau, pemeriksaan dilanjutkan ke area outlet instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau sewage treatment plant (STP) yang berada di bagian belakang kawasan Lippo Plaza.

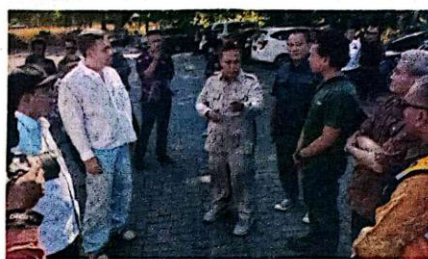
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menyatakan, pihaknya masih belum dapat memastikan adanya pencemaran air dalam pengolahan limbah Lippo Plaza tersebut. "Kami masih belum dapat memutuskan apakah Lippo Plaza memang pencemaran air dalam pengolahan limbahnya," cetusnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) ini menambahkan, terkait bau menyengat yang muncul di sungai depan mal tersebut, manajemen Lippo Plaza telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan penyedotan air hari ini. "Ketika pihak Lippo masih belum ada perubahan, secara otomatis sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Muh Dimas Zakaria menambahkan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo juga mengecek langsung outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau STP (Sewage Treatment Plant) yang berada di belakang Lippo.

"Memang terdapat bau menyengat dan sebagainya. Tapi hal itu belum bisa dijadikan indikator pencemaran sebelum hasil uji laboratorium keluar," ujar Muh Dimas Zakaria yang juga politikus Partai NasDem.

Ia menambahkan, dari DLHK



Komisi C DPRD Sidoarjo saat sidak terkait dugaan pencemaran Sungai di depan Lippo Plaza, Kamis, 13 Agustus 2026. Foto istimewa

kemudian juga akan diambil sejumlah sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Lalu, dari hasil pemeriksaan laboratorium, pengujian akan mencakup sejumlah parameter, di antaranya Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solids (TSS).

Pihak Lippo disebut juga berencana melakukan penanganan sementara pada Kamis malam. Selain itu, pengelola juga akan mengevaluasi dan memperbaiki proses pengolahan limbah yang

kolam yang digunakan dalam proses pengolahan limbah. DPRD kemudian meminta DLHK mengambil sampel dari seluruh kolam tersebut untuk diperiksa di laboratorium. "Setelahnya nanti dapat kami ketahui berapa hasil pencemaran dari kolam pertama hingga kolam terakhir," jelasnya.

Pihak manajemen Lippo Plaza, kata Anang, menyanggapi penyelesaian persoalan tersebut dalam waktu 14 hari kerja. Setelah batas waktu itu, DPRD Sidoarjo berencana memanggil manajemen Lippo Mall untuk dilakukan hearing lanjutan di gedung DPRD. "Untuk dokumen tentang perizinan Lippo Mall, mereka membutuhkan waktu karena kunjungan kami mendadak," jentrehnya.

Mall Director Lippo Plaza Sidoarjo, Eric Ricardo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya tersebut. Menurutnya, sidak tersebut membuat manajemen dapat mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di sekitar area Mall.

"Kami berterima kasih atas kunjungan kali ini, sehingga kami bisa tahu terkait kondisi

ini," cetus Eric. Ia mengakui adanya persoalan dalam satu hingga dua hari terakhir, khususnya kondisi sungai di depan Lippo yang menimbulkan bau menyengat. "Kami juga sudah melakukan identifikasi sebenarnya apa yang terjadi di sungai tersebut. Dan apapun itu yang terjadi, kami dari Lippo tetap akan bertanggung jawab sepenuhnya," cetusnya.

Sebagai langkah awal, manajemen berencana melakukan penyedotan air sungai pada Kamis malam. Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan sekaligus meminimalisir bau menyengat yang dikeluhkan warga. "Kami berencana melakukan pembersihan melalui penyedotan air sungai, minimal untuk menghilangkan dan meminimalisir bau menyengat yang terjadi," jelas Eric.

Selain penanganan di bagian belakang Lippo Plaza akan mengevaluasi kinerja vendor yang selama ini dipercaya menangani pengolahan limbah. Eric menegaskan, manajemen Lippo Plaza siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut, termasuk kepada masyarakat Sidoarjo dan warga yang tinggal di sekitar lokasi. (sta/adv)

Sebagai langkah awal, manajemen berencana melakukan penyedotan air sungai pada Kamis malam. Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan sekaligus meminimalisir bau menyengat yang dikeluhkan warga. "Kami berencana melakukan pembersihan melalui penyedotan air sungai, minimal untuk menghilangkan dan meminimalisir bau menyengat yang terjadi," jelas Eric.

Selain penanganan di bagian belakang Lippo Plaza akan mengevaluasi kinerja vendor yang selama ini dipercaya menangani pengolahan limbah. Eric menegaskan, manajemen Lippo Plaza siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut, termasuk kepada masyarakat Sidoarjo dan warga yang tinggal di sekitar lokasi. (sta/adv)

Selain penanganan di bagian belakang Lippo Plaza akan mengevaluasi kinerja vendor yang selama ini dipercaya menangani pengolahan limbah. Eric menegaskan, manajemen Lippo Plaza siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut, termasuk kepada masyarakat Sidoarjo dan warga yang tinggal di sekitar lokasi. (sta/adv)



DIALOG: Perwakilan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo menemui Bupati Sidoarjo Subandi.

Berdialog dengan Bupati, HMI Dukung Pemberantasan Miras

■ Juga Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

KOTA-Perwakilan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo menemui Bupati Sidoarjo Subandi pada Selasa (18/8/2026). Mereka menyampaikan rencana pelantikan pengurus HMI Cabang Sidoarjo Periode 2026-2027 yang akan digelar pada Jumat, 4 September 2026. Saling dukung untuk kemajuan Sidoarjo.

Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo terpilih Ahmad Tirta datang bersama Sekretaris

HMI Cabang Sidoarjo Sultan Saladin Batubara. Mereka menyatakan harapan agar Bupati Subandi hadir dalam pelantikan tersebut. Selain itu, Pemkab Sidoarjo diharapkan dapat memfasilitasi pelantikan pengurus HMI Cabang Sidoarjo yang rencananya digelar pada 4 September 2026.

Dalam pertemuan di ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo Selasa pagi itu, HMI Cabang Sidoarjo juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan peredaran minuman keras (miras) dan program penanggulangan HIV/

AIDS yang gencar dilakukan.

Bupati Subandi menyambut baik kedatangan pengurus baru HMI Cabang Sidoarjo ini. Organisasi HMI telah menjadi salah satu garda terdepan perjuangan membangun bangsa dan negara, termasuk dalam membangun Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Bupati Subandi, mahasiswa adalah aset bangsa yang menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Pemkab Sidoarjo akan selalu mendukung program-program yang digagas dan dilaksanakan mahasiswa.

"Pemerintah daerah akan selalu merespons pengurus

HMI. Kita terus memberikan support karena Adik-Adik HMI ini penerus masa depan bangsa kita. Tugas pemerintah daerah, harus hadir di tengah-tengah mereka," ucapnya.

Bupati Subandi juga siap memfasilitasi pelantikan pengurus baru HMI Cabang Sidoarjo. Ia mempersilakan pelantikan dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa.

Segala sesuatunya, termasuk konsumsinya, akan disiapkan Pemkab Sidoarjo. Bupati Subandi ingin prosesi pelantikan di pendopo besok dapat berjalan lancar. (dik/vga)

CS | jomari dengan CamScanner



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DPRD Sidoarjo Sidak Dugaan Pencemaran Sungai Lippo Plaza Beri Waktu Dua Pekan Benahi Pengolahan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
Komisi C DPRD Sidoarjo menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke saluran Sungai depan Lippo Plaza di Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, Kamis, 13 Agustus 2026. Hal itu menyusul viralnya video warga di media sosial yang menyebut bau menyengat dan air dalam saluran air tersebut keruh dan berwarna hitam.

Rombongan Komisi C DPRD Sidoarjo terdiri dari Choirul Hidayat, Anang Siswandoko, Muh Zakaria Dimas, dan Emir Firdaus, didampingi Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Makhmud serta jajaran DLHK, terlebih dahulu memeriksa saluran air di depan pusat perbelanjaan tersebut.

Setelah menemukan kondisi air yang hitam dan berbau, pemeriksaan dilanjutkan ke area outlet instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau sewage treatment plant (STP) yang berada di bagian belakang kawasan Lippo Plaza.

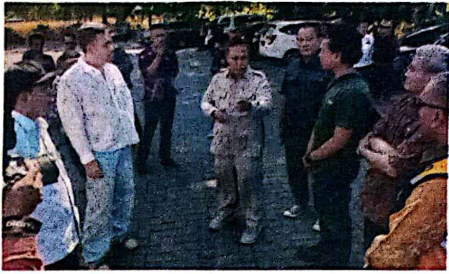
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menyatakan, pihaknya masih belum dapat memastikan adanya pencemaran air dalam pengelolaan limbah Lippo Plaza tersebut. "Kami masih belum dapat memutuskan apakah Lippo ditemukan adanya pencemaran air dalam pengolahan limbahnya," cetusnya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, terkait bau menyengat yang muncul di sungai depan mal tersebut, manajemen Lippo Plaza telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan penyedotan air hari ini. "Ketika pihak Lippo masih belum ada perubahan, secara otomatis sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Muh Dimas Zakaria menambahkan, pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo juga mengecek langsung outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau STP (Sewage Treatment Plant) yang berada di belakang Lippo.

"Memang terdapat bau menyengat dan sebagainya. Tapi hal itu belum bisa dijadikan indikator pencemaran sebelum hasil uji laboratorium keluar," ujar Muh Dimas Zakaria yang juga politikus Partai NasDem.

Ia menambahkan, dari DLHK



Komisi C DPRD Sidoarjo saat sidak terkait dugaan pencemaran Sungai di depan Lippo Plaza, Kamis, 13 Agustus 2026. foto istimewa

kemudian juga akan diambil sejumlah sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Lalu, dari hasil pemeriksaan laboratorium, pengujian akan mencakup sejumlah parameter, di antaranya Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solids (TSS).

Pihak Lippo disebut juga berencana melakukan penanganan sementara pada Kamis malam. Selain itu, pengelola juga akan mengevaluasi dan memperbaiki proses pengolahan limbah yang

dinilai bermasalah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko menambahkan sidak tersebut juga bertujuan memastikan komitmen Lippo Plaza dalam mengelola seluruh jenis limbah. "Kami hari ini ingin melihat sejauh mana pihak Lippo berkomitmen dalam mengeluarkan limbah dengan zero nol persen dari limbah apapun, baik itu padat, cair, maupun sampah," tegas Anang.

Kata Anang, dari hasil penelusuran di lokasi, terdapat tujuh

kolam yang digunakan dalam proses pengelolaan limbah. DPRD kemudian meminta DLHK mengambil sampel dari seluruh kolam tersebut untuk diperiksa di laboratorium. "Setelahnya nanti dapat kami ketahui berapa hasil pencemaran dari kolam pertama hingga kolam ketujuh," jelasnya.

Pihak manajemen Lippo Plaza, kata Anang, menanggapi penyelesaian persoalan tersebut dalam waktu 14 hari kerja. Setelah batas waktu itu, DPRD Sidoarjo berencana memanggil manajemen Lippo Mall untuk dilakukan hearing lanjutan di gedung DPRD. "Untuk dokumen tentang perizinan Lippo Mall, mereka membutuhkan waktu karena kunjungan kami mendadak," jlentrehnya.

Mall Director Lippo Plaza Sidoarjo, Eric Ricardo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan anggota DPRD Sidoarjo dan sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya tersebut. Menurutnya, sidak tersebut membuat manajemen dapat mengetahui secara langsung persoalan yang terjadi di sekitar area Mall.

"Kami berterima kasih atas kunjungan kali ini, sehingga kami bisa tahu terkait kondisi

ini," cetus Eric.

Ia mengakui adanya persoalan dalam satu hingga dua hari terakhir, khususnya kondisi sungai di depan Lippo yang menimbulkan bau menyengat. "Kami juga sudah melakukan identifikasi sebenarnya apa yang terjadi di sungai tersebut. Dan apapun itu yang terjadi, kami dari Lippo tetap akan bertanggung jawab sepenuhnya," cetusnya.

Sebagai langkah awal, manajemen berencana melakukan penyedotan air sungai pada Kamis malam. Langkah tersebut dilakukan untuk menghilangkan sekaligus meminimalisir bau menyengat yang dikeluhkan warga. "Kami berencana melakukan pembuangan melalui penyedotan air sungai, minimal untuk menghilangkan dan meminimalisir bau menyengat yang terjadi," jelas Eric.

Selain penanganan di lapangan, Lippo Plaza juga akan mengevaluasi kinerja vendor yang selama ini dipercaya menangani pengelolaan limbah. Eric menegaskan, manajemen Lippo Plaza siap bertanggung jawab atas persoalan tersebut, termasuk kepada masyarakat Sidoarjo dan warga yang tinggal di sekitar lokasi. (sta/adv)

BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Capai 46,27%

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 46,27%. Capaian tersebut melampaui target sebesar 41,34%. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo masih mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja rentan. Sebab, dari sekitar 1,05 juta angkatan kerja di Sidoarjo, masih ada ratusan ribu pekerja yang belum terlindungi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Arie Fianto Sofyan menyebut per 14 Agustus 2026 sebanyak 474.455 pekerja telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sementara sekitar 575.938 pekerja lainnya masih perlu mendapatkan perlindungan.

“Kami terus berkolaborasi dengan Pemkab Sidoarjo untuk memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus menjaga kepesertaan agar pekerja yang sudah terlindungi tidak kembali kehilangan jaminannya,” ujar Arie, Rabu (19/8/2026).

Menurut Arie, dukungan Pemkab Sidoarjo turut mendorong capaian kepesertaan menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Timur. Kolaborasi tersebut akan terus diperkuat untuk memperluas Universal Coverage Jamsostek (UCJ).

Arie menyebut perlindungan jaminan sosial telah mem-



Pemkab Sidoarjo dukung Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan.

berikan manfaat besar kepada pekerja. Hingga 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan sekitar Rp 2,2 triliun kepada lebih dari 204 ribu penerima manfaat.

Sedangkan sepanjang Januari-Juli 2026, manfaat telah diberikan kepada sekitar 31 ribu pekerja dengan nilai mencapai Rp 607 miliar. “Perbup Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2026 menjadi salah satu landasan untuk memperkuat sinergi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan perangkat daerah,” jelasnya.

Sejalan, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati menegaskan capaian kepesertaan tidak boleh hanya berhenti pada angka. Menurutnya, program perlindungan pekerja harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, ter-

masuk membantu menurunkan angka kemiskinan.

“Target yang ditetapkan bukan sekadar mengejar angka kepesertaan. Yang lebih penting adalah bagaimana perlindungan jaminan sosial ini benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan ikut menurunkan angka kemiskinan,” tegas Fenny.

Fenny meminta evaluasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke depan tidak hanya mencatat jumlah peserta dan anggaran yang telah dikeluarkan. Evaluasi juga harus dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk perubahan kelompok desil 1 hingga 5. “Kami berharap data yang ditampilkan benar-benar berdampak terhadap penurunan kemiskinan,” tuturnya. (md/rus)

Info **Haji**



Mochamad Irfan Yusuf
Menteri Haji dan Umrah

Pemerintah Usul BPIH
2027 Naik 10-15 Persen

BIPIH Jemaah Tak Alami Kenaikan Signifikan

Jakarta-HARIAN BANGSA

Pemerintah akan mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2027 sebesar 10 hingga 15 persen. Namun, pemerintah mengupayakan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah tidak mengalami

Bersambung ke Hal. 11

● BPIH...

Sambungan dari halaman 1

kenaikan signifikan. “Kita kembali ke tahun 2022 ketika pasca-Covid-19 di mana komposisi pembagian nilai manfaat hampir 60 persen yang dibayar jemaah 40 persen,” kata kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Salah satu elemen yang menyebabkan kenaikan biaya BPIH adalah harga BBM yang kini berbeda. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menghapus layanan paling murah atau kelas D. “Jenis layanannya pun berbeda karena pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, kita masuk ke layanan C yang otomatis harganya berubah juga,” kata Gus Irfan.

Dengan perubahan tersebut, Irfan menjelaskan, akan ada peningkatan pelayanan bagi jemaah

haji. Terlebih, pemilihan kelas C turut meningkatkan fasilitas yang diberikan pemerintah Arab Saudi.

“Tentu pelayanan di Armuzna, pasti itu berbeda. Tenda-tenda nya berbeda, kasurnya berbeda ukuran-ukurannya. Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan,” kata Gus Irfan.

Namun, usulan kenaikan BPIH tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi VIII DPR. Hari ini dijadwalkan rapat antara Komisi VIII DPR, Kemenhaj, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Tapi nanti akan kita diskusikan dengan teman-teman Komisi VIII DPR di Panja BPIH,” kata Gus Irfan. Dalam rapat evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 pada Juli lalu, Kemenhaj telah mengusulkan kenaikan BPIH. Besarannya untuk tahun 2027 naik sekitar Rp19 juta menjadi Rp107 juta.

“Usulan BPIH tahun 1448 Hi-

jriah atau 2027 Masehi sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah,” kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026.

“Atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806,57 rupiah,” sambung Gus Irfan.

Meski begitu, skema pembayaran telah disiapkan Kemenhaj untuk meringankan biaya yang harus dibayarkan jemaah.

Yakni, 60 persen dibayar melalui nilai manfaat dan 40 persen melalui biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih sehingga biaya yang dibayarkan jemaah tidak terlalu berbeda dari tahun lalu. “Usulan ini diajukan untuk meringankan beban finansial jemaah di tengah proyeksi kenaikan. Dengan pembagian seperti itu, kita hitung Bipih yang dibayar jemaah tidak jauh berbeda dengan Bipih tahun yang lalu,” ujar Gus Irfan. (rmol/lan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Buka Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji 2027

JAKARTA - Rekrutmen petugas haji 2027 resmi dibuka oleh Kementerian Haji dan Ummah (Kemenhaj). Pada tahap awal, formasi petugas haji yang dibuka untuk petugas bidang kesehatan. Mereka nantinya bertugas di Arab Saudi, serta di pesawat mendampingi jemaah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Ummah Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan, proses Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi resmi dibuka mulai hari ini (20/8) sampai 26 Agustus depan.

Puji mengatakan seleksi dilakukan secara objektif dan akuntabel. Sehingga

bisa mendapatkan petugas kesehatan yang profesional, berintegritas, dan kompeten.

"Petugas haji dituntut memiliki kompetensi sesuai bidang tugas dan komitmen penuh dalam melayani jemaah," katanya.

Puji menegaskan bahwa seluruh proses seleksi PPIH bebas gratifikasi dan tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta diminta mengikuti proses pendaftaran secara mandiri. Kemudian harus memastikan seluruh dokumen yang disampaikan benar.

Secara umum, calon petugas dituntut sehat jasmani dan rohani. Kemudian memiliki integritas dan rekam jejak yang baik. Secara teknis juga harus

SELEKSI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) BIDANG KESEHATAN MUSIM HAJI 2027

- Pendaftaran 20-26 Agustus
 - Computer Assisted Test (CAT) 31 Agustus
 - Medical Check Up (MCU) 3-8 September
 - Pengumuman Kelulusan 15 September
- Keterangan**
Formasi yang dibuka PPIH Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi
- Sumber: Kementerian Haji dan Ummah

PELAYANAN JEMAAH:
PPIH bidang kesehatan bertugas melayani jemaah haji 2026. Pendaftaran untuk PPIH kesehatan resmi dibuka.



mampu mengoperasikan aplikasi komputer maupun gawai berbasis Android dan/atau iOS. Pelamar diutamakan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris.

Di bagian lain, Plt Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj Dani Pramudyanto menjelaskan, untuk petugas kesehatan ada dua kelompok usia saat mendaftar. Peserta berusia

paling rendah 25 tahun, dan paling tinggi 57 tahun bagi yang bertugas sebagai tenaga kesehatan kloter. "Kemudian untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Sektor dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia, berusia paling rendah 27 tahun dan paling tinggi 55 tahun," jelasnya.

Saat mendaftar peserta harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai peminatan tugas.

Dia menjelaskan formasi yang dibuka mencakup PPIH Kesehatan Kloter. Terdiri atas dokter atau dokter spesialis dan perawat. Sementara itu formasi PPIH Kesehatan Arab Saudi dan tenaga kesehatan bandara mencakup beberapa profesi. (wan/bas)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Satpol PP Copot 35 Reklame Bermasalah

SEBANYAK 35 reklame dicopot Satpol PP Sidoarjo karena melanggar aturan. Selain bermasalah karena tak berizin, ada reklame yang

izin pemasangannya habis. Salah satu reklame yang dicopot berada di Jalan Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo. Untuk menertibkan rek-

lame, petugas menyisir 10 ruas jalan yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, Jalan Pahlawan, Jalan Cemengkalang, Jalan

Sarirogo, Jalan Pagerwojo, Jalan Raya Buduran, Jalan Mojopahit, Jalan Raya Candi, dan Jalan Raya Porong. (*)

CS

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jawa Pos Ajak Guru Berani Menulis Opini

SIDOARJO - Program Komunitas Guru Menulis Jawa Pos memasuki *batch* 2. Pada pelatihan kali ini, *Jawa Pos* menggandeng Forum Silaturahmi Kepala Sekolah Muhammadiyah SD-MI Jawa Timur (Foskam Jatim). Kegiatan yang berlangsung di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo pada Sabtu (15/8) itu diikuti 50 guru dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Ketua Foskam Jatim Edy Susanto mengatakan, pelatihan tersebut menjadi ruang untuk menggali dan mengembangkan potensi me-

nulis guru. "Kami mengundang ahli menulis dari *Jawa Pos* agar teman-teman guru lebih kompeten dalam menuangkan gagasan," ujarnya.

Dia menjelaskan, penguatan literasi merupakan ikhtiar Foskam Jatim untuk mendorong sekolah semakin unggul. Keunggulan itu tidak hanya diukur dari capaian akademik, tapi juga dari mutu layanan, kualitas pembelajaran, dan pembentukan karakter.

Edy berharap pelatihan tersebut menghasilkan karya nyata, termasuk buku ber-



Kami mengundang ahli menulis dari *Jawa Pos* agar teman-teman guru lebih kompeten dalam menuangkan gagasan."

Edy Susanto
Ketua Foskam Jatim

sama yang memuat tulisan guru. "Dengan berkarya, kita akan dikenang. Walaupun sudah tidak di sekolah itu, kalau kita punya karya, tu-



BERBAGI PANDANGAN: Redaktur *Jawa Pos* Andri Teguh Pryantoro menyampaikan materi tentang menulis opini kepada guru-guru se-Jatim.

lisan itu akan selalu diingat anak cucu kita," kata kepala SD Muhammadiyah 4 Surabaya tersebut.

Wakil Pemimpin Redaksi *Jawa Pos* Firzan Syahroni menyatakan, guru memiliki banyak pengalaman yang layak dituangkan dalam opini. Mulai dinamika pembelajaran, persoalan siswa, komunikasi

dengan orang tua, hingga kebijakan pendidikan.

Pengalaman tersebut bisa menjadi modal untuk menghasilkan gagasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Jangan menunggu tulisan sempurna baru mulai menulis. Mulailah dari apa yang kita tahu dan alami," ujarnya. (mad/hen)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KEMENTERIAN SOSIAL

1,49 Juta Penerima Bansos Ditangguhkan karena Terindikasi Judol

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengambil langkah tegas terkait penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi main judi online (judol). Jutaan keluarga penerima bansos akhirnya dicoret dari list warga yang berhak menerima.

Dari hasil pengecekan Kementerian Sosial (Kemensos) atas data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), tercatat sebanyak 1.494.652 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi

judol. Yang lebih mengejutkan adalah, status anak menjadi kelompok yang paling banyak terindikasi. Angkanya mencapai lebih dari satu juta.

Kemudian, terdapat 458 ribu dengan status kepala keluarga atau suami, sekitar 40 ribu istri, dan lebih dari 23 ribu cucu yang terindikasi melakukan kegiatan ilegal tersebut. Sisanya merupakan anggota keluarga dengan status lain, seperti menantu dan mertua.

"Jadi kita cek dalam satu keluarga ini, ada tidak yang main judi online. Ketahuanlah ada anaknya ternyata, ada suaminya. Mungkin penerima bansosnya tidak main, tapi ternyata anaknya," ujar Kepala Pusat Data dan In-



Saifullah Yusuf

ANTARA

formasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin), Kemensos, Joko Widiarto dikutip Rabu (19/8).

Angka transaksinya pun cukup besar. Sepanjang 2025, nilai transaksi rata-rata mencapai Rp 1,9 juta per orang. Adapun transaksi terendah tercatat Rp 5 ribu, sedangkan yang tertinggi mencapai Rp 2,68 miliar.

Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa para KPM yang terindikasi judol ini akan ditangguhkan terlebih dahulu status penerima bansosnya. Pihaknya

pun tengah menyiapkan calon-calon penggantinya.

"Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk judi online. Jangan digunakan untuk main judol," tegas Saifullah.

Kendati demikian, lanjut dia, Kemensos akan membuka ruang klarifikasi bagi KPM yang data-nya terindikasi transaksi judol. Klarifikasi dapat dilakukan melalui pemerintah desa maupun pendamping sosial. (mia/bas)

Jawa Pos

Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Didorong Jadi Jurus Tekan Kemiskinan

KOTA-Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo tak lagi cukup diukur dari banyaknya pekerja yang terdaftar. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kini mendorong agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan benar-benar berdampak pada kesejahteraan sekaligus membantu menekan angka kemiskinan.

Hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 474.455 pekerja dari sekitar 1,05 juta angkatan kerja di Sidoarjo telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Capaian tersebut setara 46,27 persen, melampaui target 41,34 persen.

Namun, angka tersebut juga menunjukkan masih ada sekitar 575.938 pekerja yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, perluasan kepesertaan harus dibarengi dengan evaluasi terhadap dampak program bagi masyarakat.

"Kepesertaan itu tidak boleh berhenti sebagai pencapaian angka. Program perlindungan pekerja harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung penurunan angka kemiskinan," ujar Fenny saat Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2026 dan Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan, Selasa (18/8).

Menurut Fenny, evaluasi BPJS Ketenagakerjaan ke depan tidak cukup hanya mencatat jumlah peserta maupun anggaran yang telah dikeluarkan. Pemerintah perlu melihat keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk perubahan pada kelompok desil satu hingga lima.

"Kami berharap data yang



PERLINDUNGAN: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati saat Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2026 dan Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan, Selasa (18/8).

ditampilkan benar-benar berdampak terhadap penurunan kemiskinan," tegasnya.

Untuk memperluas perlindungan, Pemkab Sidoarjo mendorong Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan. Gerakan tersebut diusulkan dimulai dari pejabat struktural di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan diterapkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fenny menyebut gerakan tersebut sebagai bentuk kepedulian aparatur pemerintah terhadap pekerja yang berada dalam kondisi rentan.

"Gerakan ASN Sadar BPJS Ketenagakerjaan kami harapkan dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah, dimulai dari pejabat struktural. Ini merupakan bentuk kepedulian kita untuk membantu memberikan perlindungan kepada pekerja rentan," katanya.

Tak hanya pekerja rentan, seluruh OPD juga diminta memastikan siswa maupun mahasiswa yang menjalani kegiatan magang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Guru PPPK Penuh Waktu Bisa Jadi PNS



Seleksi PNS diperkirakan akan mulai pendaftaran di awal 2027."

Rini Widyantini
Menteri Peningkatan Mutu
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Guru PPPK Paruh Waktu Juga Berpeluang Naik Status
- Skema Penggajian Beralih dari Pemerintah Daerah ke Pusat

JAKARTA – Pemerintah berencana mengubah status guru PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat. Baik untuk pengajar di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun Kementerian Agama (Kemenag). Dengan demikian, beban penggajian mereka akan beralih ke pemerintah pusat. Selain itu, PPPK penuh waktu juga berpeluang menjadi PNS lewat seleksi PNS dan PPPK paruh waktu bisa menjadi PPPK penuh waktu.

Baca Guru... Hal 2

Jawa Pos

Guru PPPK Penuh Waktu Bisa Jadi PNS

Sambungan dari Hal 1

Menurut Menteri Peningkatan Mutu Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, pemerintah memproyeksikan pemenuhan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan ratusan ribu guru tersebut untuk mengisi slot di sekolah yang diarahkan Kemendikdasmen, Kemenag, maupun program baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.

Karenanya, pemerintah telah menjadwalkan adanya seleksi CPNS tahun depan. "Seleksi PNS diperkirakan akan mulai pendaftaran di awal 2027," ujar Rini.

Seleksi itulah yang bisa diikuti PPPK penuh waktu. Mengenai kenaikan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga akan dilakukan tahun depan, tapi sampai dengan kemarin (19/8) Rini belum men-

laskan apakah melewati tes atau otomatis.

Rapat mengenai nasib para guru PPPK paruh waktu itu berlangsung di kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa (18/8) malam. Saat ini jumlah PPPK guru paruh waktu tercatat mencapai 231.246 orang. Sementara itu, PPPK guru penuh waktu sebanyak 955.245 orang.

Koordinasi Panjang

Dalam kesempatan rapat yang sama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan, keputusan itu diambil melalui persiapan dan koordinasi panjang. Mulai dari perhitungan soal jumlah guru yang dibutuhkan beserta mata pelajaran yang diajarkan hingga kemampuan fiskal untuk menggaji mereka.

"Tapi, alhamdulillah hari ini tadi (Selasa, 18/8) semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama, PPPK paruh wak-

tu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS gitu," paparnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya mengenai rencana tersebut. Dia mengklaim bahwa kebijakan itu bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainability fiskal.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyebut, pemerintah bersama DPR terus mengusahakan penataan status kepegawaian guru PPPK tersebut. "Langkah ini diharapkan semakin memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan di seluruh In-

donesia," ujarnya.

Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, kebijakan itu merupakan jawaban atas harapan para kepala daerah yang kerap disampaikan kepada pemerintah pusat. Yakni, soal bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan alih status dari paruh waktu serta penuh waktu.

"Karena itu, kami meminta agar pemda tidak melakukan rekrutmen honoror lagi," katanya.

Nasib Guru Non-ASN

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan, langkah menaikkan status para guru PPPK paruh waktu memang memberikan kepastian status dan jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Sebab, selama ini para

guru PPPK paruh waktu sejatinya berada dalam kondisi tidak pasti.

Namun, dia mengingatkan bahwa kebijakan itu bisa jadi hanya solusi sesaat sebagai respons cepat untuk menyelamatkan nasib para guru PPPK tersebut, khususnya PPPK paruh waktu. "Karena sebenarnya yang belum jelas sampai saat ini adalah nasib guru-guru yang non-ASN, yang gajinya masih Rp 100-200 ribu itu, bagaimana nasib mereka?" katanya kepada Jawa Pos kemarin.

Mereka paling banyak mengajar di madrasah. Bisa dibayangkan, jumlahnya mencapai 95 persen dari total guru madrasah. "Ini juga harus ada kepastian status dan juga kesejahteraan," katanya.

Ubaid menilai, alih-alih naik kelas seperti ini, sebenarnya yang paling ideal adalah menjamin kesejahteraan para guru. Tak perlu banyak status. Cukup satu: PNS.

Mengenai status guru yang ditarik ke pusat,

Ubaid menilai, kebijakan itu mengancam desentralisasi pendidikan yang diamanatkan oleh UU Otonomi Daerah. Ketika status kepegawaian ditarik ke pusat, pemenuhan hak dasar warga atas pendidikan justru berisiko berjauhan dari realitas lokal.

Risiko terbesar adalah kerancuan kewenangan. "Penarikan status kepegawaian ke pemerintah pusat menciptakan risiko kontrol birokrasi sentralistik yang kaku," katanya. (mia/ttg)

Jawa Pos

100 TPS 3R Tunggak Retribusi Sampah

Terancam Sanksi Jika Tak Cicil Utang

SIDOARJO – Masalah pengelolaan sampah di Kota Delta belum sepenuhnya tuntas. Selain Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Desa Suko, ternyata ada 99 TPS 3R lagi yang menunggak retribusi. Total tagihan yang belum dibayar mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

Kepala Bidang Pengelola Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Anas Budi Utama Nazir mengatakan, sebagian TPS 3R telah mencicil utang.

Mereka rata-rata mengangsur pembayaran Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan. "Kemampuan TPS 3R berbeda-beda dan bergantung keuangan yang



PROTES: Warga Desa Suko meminta sampah yang menumpuk di TPS segera dibersihkan karena menimbulkan bau dan meluber ke jalan.

berasal dari iuran warga," kata Anas.

Dari sekitar 100 TPS 3R yang masih memiliki tunggakan, ada beberapa lembaga yang mencatat kewajiban cukup besar. TPS 3R Desa Bluru dan Kemiri menjadi dua pengelola dengan tunggakan tertinggi dan masing-masing mencapai lebih dari Rp 200 juta. "Kami berencana melakukan evaluasi untuk penge-

lola yang tunggakannya besar," tambah Anas.

Hentikan Layanan 11 TPS 3R

Persoalan pembayaran juga menjadi perhatian pengelola TPA Griyo Mulyo di Jabon. Kepala TPA Griyo Mulyo Hajid Arif Hidayat mengatakan, kelancaran pembayaran dari TPS 3R berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan persampahan. "Kami

SAMPAH DI TANGAN TPS 3R

- Ada 100 TPS 3R yang menunggak retribusi
- Nilai tunggakan lebih dari Rp 1 miliar
- 11 TPS 3R disanksi pemutusan layanan karena menunggak



■ Tunggakan TPS 3R Desa Bluru dan Kemiri paling banyak

Sumber: DLHK Sidoarjo

GRAFIS: ADITT/JAWA POS

berharap pembayaran dari TPS 3R bisa lancar karena operasional di TPA juga terus jalan," kata Hajid.

Dia mengingatkan pengelola TPS 3R agar tidak membiarkan tunggakan berlarut-larut. Langkah tegas bahkan telah diterapkan terhadap sejumlah TPS 3R. Pengelola TPA Griyo Mulyo sebelumnya menghentikan layanan pembuangan sampah terhadap 11 TPS karena tunggakan retribusi yang menumpuk dan tidak kunjung diselesaikan.

Penghentian tersebut menjadi pilihan terakhir setelah pengelola TPS 3R mendapat

kan peringatan. Namun, tidak ada respons maupun penyelesaian pembayaran yang sesuai harapan. "Sebelumnya masih kami layani terus, tetapi tidak ada itikad baik dari pengelola untuk menyelesaikan piutang itu," ujar Hajid.

Hajid menyadari penghentian layanan dapat menimbulkan dampak terhadap pengelolaan sampah di wilayah terdampak. Namun, kebijakan tersebut harus diambil karena berkaitan dengan tanggung jawab terhadap penerimaan daerah dan pertanggungjawaban keuangan. (ful/hen)

Jawa Pos

PERSIDANGAN

Bupati Subandi Absen Sidang Sengketa Pilkadaes

SIDOARJO – Sidang sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Balongdowo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya kembali tertunda. Bu-



Seharusnya, bupati mematuhi panggilan PTUN. Ketidakhadiran tergugat membuat persidangan semakin panjang.”

Djupri

*Kuasa Hukum
Penggugat*

pati Sidoarjo Subandi dan Kepala Desa (Kades) terpilih Moch Yatim selaku tergugat tidak hadir dalam persidangan kemarin (19/8).

Ketidakhadiran pihak tergugat membuat agenda pemeriksaan keterangan tergugat belum dapat dilakukan. Majelis hakim kemudian menjadwalkan ulang agenda tersebut Rabu (26/8) pekan depan.

Kuasa hukum penggugat Djupri mengatakan, persidangan sebenarnya menjadi kesempatan untuk menggali keterangan dari pihak tergugat. Namun, karena pihak yang dipanggil tidak hadir, agenda pemeriksaan ditunda. “Seharusnya, bupati mematuhi panggilan PTUN. Ketidakhadiran tergugat membuat persidangan semakin panjang,” katanya.

Kabid Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo Hernita Hadi Lestari menjelaskan alasan ketidakhadiran Subandi. Menurut dia, pihak yang akan mewakili Subandi belum mengantongi surat kuasa. “Saya sudah berkomunikasi dengan Kabag Hukum. Untuk bupati dikuasakan ke Jaksa dari Kejari, tapi surat kuasanya belum turun sehingga belum ada yang mewakili,” jelasnya.

Hernita menegaskan, ketidakhadiran Bupati bukan berarti pemkab mengabaikan gugatan. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan bagian hukum untuk menangani perkara tersebut. “Masih dalam proses penunjukan,” ujarnya. (ful/hen)

CS Dipinda dengan CamScanner

Jawa Pos

Kecamatan Jabon Produktip Hasilkan Komoditi Rumput Laut

Sidoarjo, Bhirawa

Kecamatan Jabon merupakan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang paling produktif dalam menghasilkan komoditi rumput laut. Bahkan komoditi rumput laut warga Kecamatan Jabon ini bisa menembus Negara Australia.

Kepala Bidang Produksi dan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Choiri SAP MHP, mengatakan, produksi komoditi rumput laut di Kecamatan Jabon, berasal dari desa Kedungpandan, Desa Permisan dan Desa Kupang. Di Desa Kupang ada seluas 830 ha tambak yang dibudidayakan rumput laut, Desa Kedungpandan 445 ha dan di Desa Permisan 87 ha.

“Semua kecamatan yang termasuk pesisir atau wilayah timur kabupaten Sidoarjo potensi, namun yang paling produktif dan besar dari kecamatan Jabon,” kata Choiri, Rabu (19/8) kemarin.

Choiri menjelaskan, produksi komoditi rumput laut di Kabupaten Sidoarjo, mulai Januari hingga Maret 2026 ini sudah sebanyak 19.114.991 kg. Setelah Kecamatan Jabon, wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang produktif dalam menghasilkan komoditi rumput laut adalah Kecamatan Sedati.

Kabupaten Sidoarjo, tegas Choiri, jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah rumput laut merah jenis *Gracilaria*. Komoditi rumput laut dari Sidoarjo ini banyak menghasilkan devisa, karena hasil produksi tambak ini bisa menembus pasar ekspor internasional, seperti Australia.

“Pengelolaan dan pemasaran produksi rumput laut di Kecamatan Jabon dikoordinasikan lewat lembaga seperti Koperasi Sumber Mulyo yang ada di Desa Kupang dan Koperasi Agar Makmur Sentosa di Desa Kedungpandan,” tandas Choiri. [kus.fen]



alikus/bhirawa
rumpot laut merah jenis *gracilaria*, sedang dijemur petani rumput laut di Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

CS Dipinda dengan Canva.com

Bupati dan Kades Balongdowo Tak Datang, Sidang Sengketa Pilkada Ditunda



DIKRY SANSIRU/RADAR SIDOARJO

DITUNDA: Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Desa (Kades) Balongdowo terpilih Muhammad Yatim tidak hadir dalam sidang di PTUN Surabaya, Rabu (19/8).

KOTA-Sidang sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Balongdowo, Kecamatan Candi, Sidoarjo, ditunda. Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Desa (Kades) Balongdowo terpilih Muhammad Yatim yang berstatus tergugat tidak hadir dalam agenda pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Rabu (19/8).

Ketidakhadiran para pihak tersebut membuat persidangan kembali dijadwalkan pada Rabu (26/8) mendatang. Dalam sidang lanjutan tersebut, pengadilan kembali akan memanggil pihak-pihak yang belum hadir.

Kuasa hukum Calon Kepala Desa (Cakades) Balongdowo Suparlan, Djupri, mengatakan agenda persidangan kali ini masih berupa pemeriksaan persiapan dan koreksi gugatan. Pengadilan juga memanggil para pihak yang belum hadir, termasuk Muhammad Yatim selaku kepala desa terpilih.

"Sidang hari ini koreksi gugatan dan memanggil para pihak yang belum hadir, termasuk

● Ke Halaman 10

CS

RADAR
SIDOARJO.ID

Bupati dan Kades...

Kepala Desa Balongdowo Muhammad Yatim. Sudah dipanggil dan ditunda minggu depan," ujarnya.

Djupri menyayangkan ketidakhadiran Bupati Sidoarjo dalam persidangan. Menurutnya, seluruh pihak yang telah mendapatkan panggilan resmi pengadilan semestinya menghormati dan mengikuti proses persidangan.

"Ya tentunya, kami harapkan menghormati, mengikuti relas yang ditentukan oleh pengadilan," tegasnya.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada

majelis hakim terkait langkah selanjutnya apabila para pihak kembali tidak hadir dalam persidangan. Menurutnya, proses pemeriksaan persiapan masih memiliki waktu sekitar 30 hari sesuai ketentuan yang berlaku sebelum perkara masuk ke tahapan berikutnya.

Sementara itu, Suparlan juga mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Bupati Sidoarjo maupun kepala desa terpilih dalam persidangan. "Ya tentu kecewa. Karena ketidakhadiran dari kepala desa terpilih dan Pak Bupati tak hadir tadi. Maka untuk minggu depan dipanggil lagi semua," katanya.

Dari Pemkab Sidoarjo, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo Hernita Hadi Lestari menjelaskan bahwa pihaknya hadir untuk mendampingi panitia dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Balongdowo dalam perkara tersebut.

Menurut Hernita, agenda persidangan Rabu (19/8) masih merupakan pemeriksaan persiapan. Sidang tersebut menjadi agenda kedua setelah pemeriksaan sebelumnya.

Terkait ketidakhadiran Bupati Sub-

CS

RADAR
SIDOARJO.ID



ANJLOK: Peternak ayam petelur di Sidoarjo.

Harga Telur Anjlok, Dispaperta Tegaskan Pasokan Banyak dari Luar Daerah

HARGA telur ayam yang anjlok di tingkat peternak ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi produksi di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaperta) Sidoarjo menegaskan, wilayahnya bukan sentra produksi telur. Bahkan, kebutuhan telur masyarakat Sidoarjo selama ini justru banyak dipasok dari peternakan di luar daerah.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Produksi Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispaperta Sidoarjo drh Erwin Priatmoko, Rabu (19/8).

Menurut Erwin, produksi telur dari peternak Sidoarjo relatif sedikit dibandingkan kebutuhan

● Ke Halaman 10

Harga Telur Anjlok,...

pasar. Karena itu, hampir seluruh telur yang beredar melalui distributor di Sidoarjo berasal dari kabupaten sekitar.

"Distributor mengambil dari daerah asal sesuai kebutuhan atau permintaan pasar di Sidoarjo," ujarnya.

Kondisi tersebut sekaligus membuat Dispaperta Sidoarjo tidak menemukan persoalan terkait surplus telur produksi peternak lokal. Sebab, telur yang dihasilkan peternak Sidoarjo disebut langsung terserap pasar. "Produksi telur Sidoarjo sedikit dibanding kebutuhan pasar di Sidoarjo," jelasnya.

Erwin juga menegaskan, persoalan harga pakan yang kerap menjadi

keluhan peternak telur di sejumlah daerah belum menjadi persoalan yang diterima pihaknya. Alasannya, populasi dan produksi telur di Sidoarjo relatif kecil sehingga tidak terdapat keluhan terkait kebutuhan maupun harga pakan dari peternak setempat.

Di sisi lain, keberadaan perusahaan peternakan skala besar juga menjadi perhatian. Menurut Erwin, perusahaan besar yang berada di Sidoarjo memiliki pola pemasaran tersendiri. Produk mereka dipasarkan melalui koperasi maupun toko retail yang dimiliki perusahaan.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan telur masyarakat Sidoarjo, pasokan dari peternak lokal hanya memberikan kontribusi dalam jumlah

terbatas. Sebagian besar kebutuhan tetap dipenuhi dari peternakan di luar Sidoarjo.

Terkait kemungkinan sinergi penyerapan telur melalui program bantuan sosial, penanganan stunting, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Dispaperta kembali menekankan bahwa pasokan telur untuk pasar Sidoarjo mengikuti kebutuhan dan permintaan distributor.

Sementara itu, terkait kabar rencana aksi unjuk rasa kelompok peternak akibat anjloknya harga telur, Dispaperta mengaku belum menerima pemberitahuan resmi.

"Sampai saat ini kami belum menerima pemberitahuan ataupun informasi terkait rencana aksi demo

tersebut," kata Erwin.

Meski demikian, pihaknya menyatakan siap menerima aspirasi peternak apabila nantinya mereka datang menyampaikan keluhan secara langsung. "Kita terima dulu apa aspirasi dari teman-teman peternak," tegasnya.

Untuk solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan modernisasi

pascapanen seperti fasilitas pengolahan telur maupun cold storage, Dispaperta menilai kondisi di Sidoarjo berbeda dengan daerah sentra produksi telur. Pasalnya, hasil produksi peternak lokal saat ini masih langsung terserap pasar. "Telur produksi peternak di Sidoarjo langsung terserap pasar semuanya," pungkasnya. **(dik/vga)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Suara Horeg Jangan Cuma Dilarang, Anggota DPRD Sidoarjo Minta Dikemas Jadi Budaya



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Kerluhan audio berdaya bass tinggi alias sound horeg dinilai memiliki sisi positif jika dikelola secara rinci dan teratur. Wakil rakyat dari Kota Delta pun menyarankan agar tradisi pengeras suara ini diintegrasikan ke dalam agenda kebudayaan daerah tanpa mengabaikan ketertiban umum. Pantai & Kepulauan Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar, mengungkapkan bahwa keberadaan sound horeg tidak selayaknya melulu dicap miring. Perangkat audio tersebut sejatinya dapat menyemarakkan acara lokal seperti karnaval budaya, selama mengantongi regulasi yang pasti dan mengedepankan kenyamanan warga sekitar. "Kolaborasi dengan kegiatan budaya itu sangat memungkinkan dan menarik, misalnya masuk dalam bagian karnaval. Masalah baru timbul jika penyelenggaraannya abai aturan hingga memicu gangguan," kata Zahlul saat ditemui, Rabu (19/8/2026). Politikus Partai Demokrat itu menekankan pentingnya peran panitia penyelenggara dalam mengemas acara. Jika dikonsep secara matang, deretan sound system raksasa tersebut justru berpeluang mendatangkan dampak ekonomi bagi pedagang kecil dan pelaku usaha lokal. Guna mengantisipasi maraknya pawai jelang akhir Agustus, Legislator Sidoarjo ini mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan pedoman operasional yang tegas. Langkah koordinasi bersama jajaran Forkopimca, jajaran kepolisian sektor, hingga pemerintah desa pun telah berjalan demi membatasi volume suara agar tidak melebihi kapasitas (overload). Di samping masalah volume, Zahlul memberikan sejumlah catatan kritis terkait tren sound horeg saat ini: Pencegahan Pergeseran Nilai: Menepis citra negatif sebagai 'diskotek berjalan', panitia wajib memfilter penampilan peserta, termasuk melarang busana yang tidak sopan atau perilaku yang melanggar norma sosial. Pembatasan Jam Operasional: Kegiatan disarankan rampung paling lambat pukul 22.00 WIB guna mencegah gangguan istirahat warga pada malam hari. Pendekatan Solutif: Pemkab diimbau tidak sekadar menerapkan larangan total, melainkan memberikan petunjuk teknis serta solusi alternatif bagi para pegiat audio. Zahlul mengingatkan bahwa tradisi mengerahkan pengeras suara sebenarnya telah lama ada dalam ritual adat warga seperti sedekah bumi. Hanya saja, pergeseran tren modern menuntut hadirnya payung hukum yang lebih responsif agar kearifan lokal tetap lestari tanpa mengorbankan ketenteraman masyarakat.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Direksi ke Jakarta, Hearing Kasus Narkoba Pegawai Delta Tirta Sidoarjo Tertunda



Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Hearing antara Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Java Corruption Watch (JCW) terkait dugaan pembiaran penyalahgunaan narkoba oleh pegawai Perumda Delta Tirta Sidoarjo terpaksa dibatalkan, Rabu (13/8/2026). Agenda yang sedianya digelar di ruang rapat Komisi B ini tertunda lantaran jajaran direksi Perumda Delta Tirta absen. Asia Tenggara & Kepulauan Pasifik Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujiyanto, membenarkan batalnya pertemuan kedua tersebut. Sejumlah pejabat utama Perumda Delta Tirta, termasuk Direktur Utama, Ketua Dewan Pengawas, hingga Kabag Perekonomian, berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas dinas di Jakarta. "Hari ini dari pihak Direktur Utama Perumda Delta Tirta absen karena ada tugas lain ke Jakarta. Begitu juga Ketua Dewas dan Kabag Perekonomian," ujar Bambang saat ditemui di ruang Komisi B DPRD Sidoarjo. Meski jajaran direksi absen, pihak Perumda Delta Tirta sempat diwakili oleh Kepala Bagian Hukum. Namun, JCW meminta agar rapat dengar pendapat tersebut dijadwalkan ulang agar bisa menghadirkan pengambil kebijakan secara langsung. Bambang menjelaskan bahwa aduan JCW berfokus pada tuntutan penegakan aturan dan sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar. "Tuntutannya paling tidak meminta diberikan sanksi sesuai hukum atau peraturan yang ada, baik Permendagri, PP, Perda, maupun Peraturan Direksi Perumda Delta Tirta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib dan Disiplin Pegawai," jelas politikus Partai Gerindra tersebut. DPRD Sidoarjo memaklumi ketidakhadiran jajaran direksi karena agenda di Kementerian Dalam Negeri terkait surat keputusan jajaran direksi baru juga mendesak. Bambang memastikan proses tindak lanjut aduan ini akan tetap berjalan dan segera dijadwalkan ulang. "Kita jadwalkan ulang. Nanti kita menunggu jadwal lebih lanjut. Secepatnya," pungkas Bambang.

